

Abstrak

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: (1) Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan pandemi virus Covid-19, antara lain: Kebijakan *Stay at Home*, *Work from Home*; Protokol Kesehatan "*The New Normal*"; Penerapan Protokol Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); Program Kartu Prakerja; dan Paket Kebijakan Sosial Ekonomi. (2) Upaya pemerintah daerah kota Medan terhadap banyaknya kasus PHK di perusahaan juga telah dilakukan, yaitu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan adalah program kartu Prakerja.

Kata Kunci: Pemerintah; Tenaga Kerja; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan Covid-19.